

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) KABUPATEN LANDAK 2021



DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

SAMBUTAN BUPATI LANDAK



Sesuai amanah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tanggung jawab Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab dan berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan.

Dalam rangka mendukung tanggung jawab Pemerintah tersebut, maka penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) menjadi sangat krusial. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak yang telah melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan secara komprehensif, yang telah menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan seperti tingkat ketersediaan, akses dan pemanfaatan.

Dengan adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan maka akan lebih mudah untuk membuat prioritas program, kebijakan dan kegiatan operasional untuk mengatasi masalah pangan di daerah-daerah/desa yang mengalami masalah kerentanan pangan.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan beberapa tahun terakhir indikasi berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan di Kabupaten Landak membuktikan bahwa

kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan telah berlangsung dengan baik dan tingkatkan, sehingga kedepan saya berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat berperan aktif secara bersama-sama dalam menciptakan ketahanan pangan.

Akhirnya perkenankan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Landak, mari kita menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Landak, karena dengan ketahanan pangan kita akan dapat mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta mampu mengakselerasikan pelaksanaan pembangunan untuk menuju masyarakat Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera.

Ngabang, 6 Oktober 2021


BUPATI LANDAK
dr. KAROLIN MARGRET NATASA

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berkomitmen untuk mengatasi masalah pangan dan gizi yang terjadi di wilayah ini, melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) diharapkan untuk dapat menjadi suatu langkah awal untuk memantapkan strategi dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maupun yang mungkin terjadi baik yang bersifat kronis maupun transien.

Peta ketahanan dan kerentanan pangan ini dibuat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan.

Besar harapan kami dengan diluncurkannya peta ini, dapat membawa sesuatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan dan gizi di wilayah ini oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan non pemerintah yang terkoordinasi secara sistematis melalui Badan Pangan Nasional.

Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan, komitmen dan kerjasama yang intensif dalam upaya penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan ini dapat diluncurkan tepat pada waktunya, juga kepada semua pihak terkait yang telah membantu terhadap penyusunan peta ini, yaitu dinas /badan/unit yang ada di Kabupaten Landak.

Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Landak yang semakin baik dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Ngabang, 7 Oktober 2021

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak



Sahbirin
Sahbirin, ST., MT
Pembina Tk.I

NIP. 19730903 200212 1 004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
1.3. Metodologi.....	7
II. KETERSEDIAAN PANGAN	
2.1. Lahan Pertanian.....	13
2.2. Produksi Pangan.....	15
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	16
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	18
III. AKSES PANGAN	
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah.....	20
3.2. Akses Transportasi.....	22
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan.....	25
IV. PEMANFAATAN PANGAN	
4.1. Akses Terhadap Air Bersih.....	26
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan.....	28
4.3. Dampak Dari Status Kesehatan.....	29
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan.....	30
V. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan.....	35
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan.....	37
VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	38

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten.....	8
2.	Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu.....	11
3.	Table 2.1 Sebaran Rasio luas lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas	15
4.	Tabel 2.1 Data produksi padi kabupaten Landak tahun 2020.....	16
5.	Tabel 2.2 Data produksi jagung kabupaten Landak tahun 2020.....	17
6.	Tabel 2.3 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas.....	19
7.	Tabel 3.1 Persentase populasi dibawah garis kemiskinan kabupaten Landak....	23
8.	Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas.....	24
9.	Tabel 3.3 Sebaran rasio akses jalan desa skala berdasarkan prioritas.....	27
10.	Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih skala prioritas.....	29
11.	Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan prioritas.....	30
12.	Tabel 4.3 Penderita gizi buruk.....	31
13.	Tabel 5.1 Data sebaran prioritas peta komposit.....	36

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Konsep ketahanan pangan dan gizi.....	5
2. Gambar 4.1 Kerangka intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran 1. Peta rasio lahan.....	40
2.	Lampiran 2. Peta sarana dan prasarana penyedia pangan.....	41
3.	Lampiran 3. Peta jumlah penduduk tingkat kesejahteraan rendah.....	42
4.	Lampiran 4. Peta desa tanpa akses penghubung memadai.....	43
5.	Lampiran 5. Peta rumah tangga tanpa akses air bersih.....	44
6.	Lampiran 6. Peta jumlah tenaga kesehatan.....	45
7.	Lampiran 6. Peta komposit.....	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis komposit FSVA 2020 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun desa yang berada diprioritas 1-3. Karakteristik sangat tahan pangan ditandai dengan warna hijau tua.
7. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, retribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan dan 156 desa dengan total penduduk pada tahun 2019 sebesar 377.305 jiwa (BPS). Secara geografis terletak di bagian utara garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 0°01' Lintang Selatan - 1°02' Lintang Utara dan 109°5' - 110°10' Bujur Timur. Kabupaten Landak di sebelah utara berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau.

Kabupaten Landak memiliki wilayah daratan seluas 9.909,10 km². Secara klimatologis, Kabupaten Landak memiliki pola tipe curah hujan tipe tinggi, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Perekonomian Kabupaten Landak tergantung pada sektor pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 114 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi,

stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia

dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan

penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

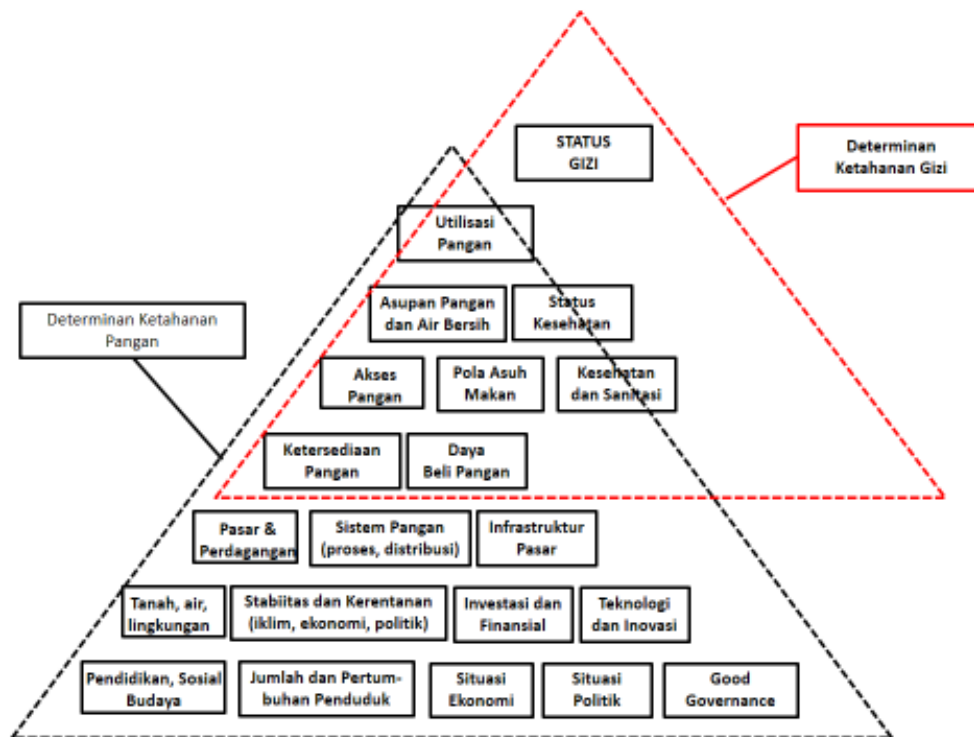
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan didalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui) dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan sosial budaya/adat istiadat.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan seperti pada table 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2021

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Ketersediaan Pangan		
1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2020
2. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2020
B. Akses terhadap Pangan		
1. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1)	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Jumlah Rumah Tangga 2020 dari

Indikator	Definisi	Sumber Data
desa	dibandingkan jumlah penduduk desa	Proyeksi SP 2020
2. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2019, BPS, Pusat Data dan Informasi Kementan 2019.
C. Pemanfaatan Pangan		
1. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin
2. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan, BPS Jumlah penduduk 2020 dari Proyeksi SP 2020

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Bobot indikator individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok prioritas 4-6), tidak berarti semua kependudukan di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

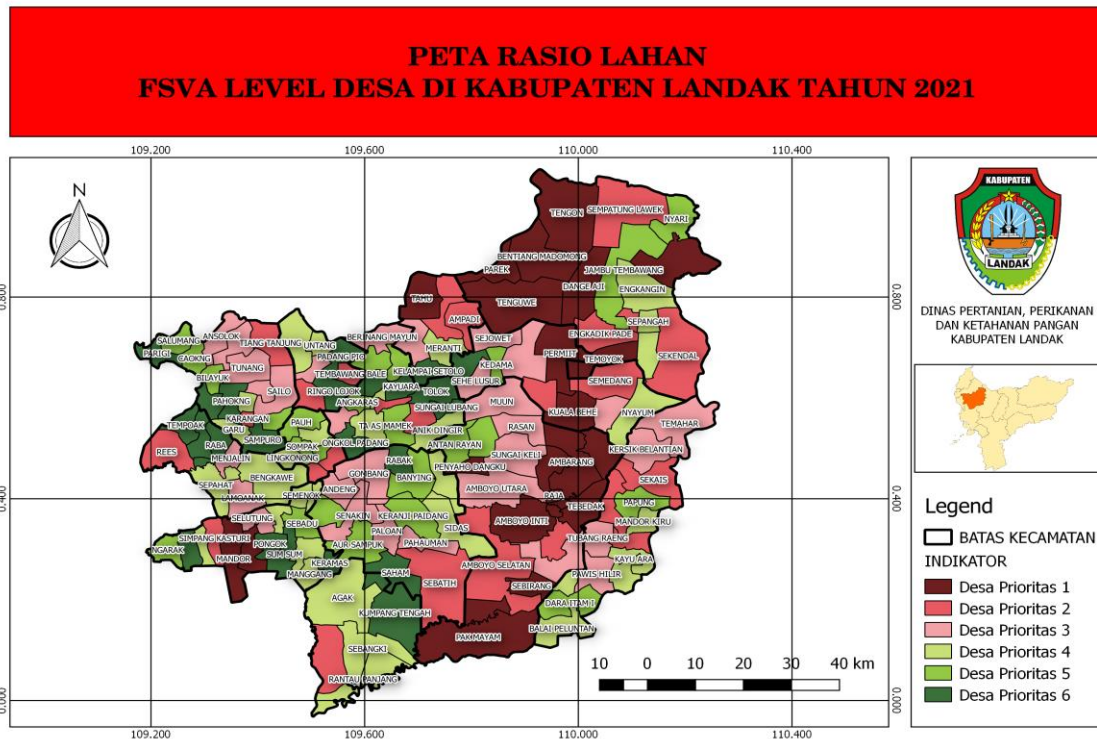
Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan disuatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan

sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 156 desa di Kabupaten Landak, 23 desa masuk dalam prioritas 1, 24 desa masuk di prioritas 2, dan 31 desa termasuk dalam prioritas 3. Adapun desa-desa yang termasuk dalam beberapa prioritas tersebut dapat dilihat pada peta rasio lahan dibawah ini.



Keterangan rasio hasil peta tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	23	14,74
2	Rentan	24	15,38
3	Agak Rentan	31	19,87
4	Agak Tahan	31	19,87
5	Tahan	24	15,38
6	Sangat Tahan	23	14,74

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Landak telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pada tahun 2019 struktur perekonomian di Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Dilihat dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sector pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 35,22% dalam pembentukan PDRB. Padi, jagung dan ubi kayu merupakan bahan pokok di Kabupaten Landak.

Tabel 2.1 Data produksi padi Kabupaten Landak tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi padi (ton)
1.	Sebangki	227,15
2.	Ngabang	228,04
3.	Sengah Temila	615,23
4.	Mandor	284,15
5.	Menjalin	187,62
6.	Mempawah Hulu	345,56
7.	Sompak	213,63
8.	Menyuke	282,96
9.	Banyuke Hulu	100,15
10.	Meranti	145,43
11.	Kuala Behe	93,43
12.	Air Besar	74,69
13.	Jelimpo	85,22

Sumber : DPPKP Kab. Landak, 2020

Tabel 2.2 Data produksi Jagung Kabupaten Landak tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi jagung (ton)
1.	Sebangki	5,56
2.	Ngabang	113,53
3.	Sengah Temila	20,73
4.	Mandor	32,72
5.	Menjalin	24,70
6.	Mempawah Hulu	87,96
7.	Sompak	36,96
8.	Menyuke	37,35
9.	Banyuke Hulu	66,43
10.	Meranti	17,02
11.	Kuala Behe	30,93
12.	Air Besar	29,87
13.	Jelimpo	4,76

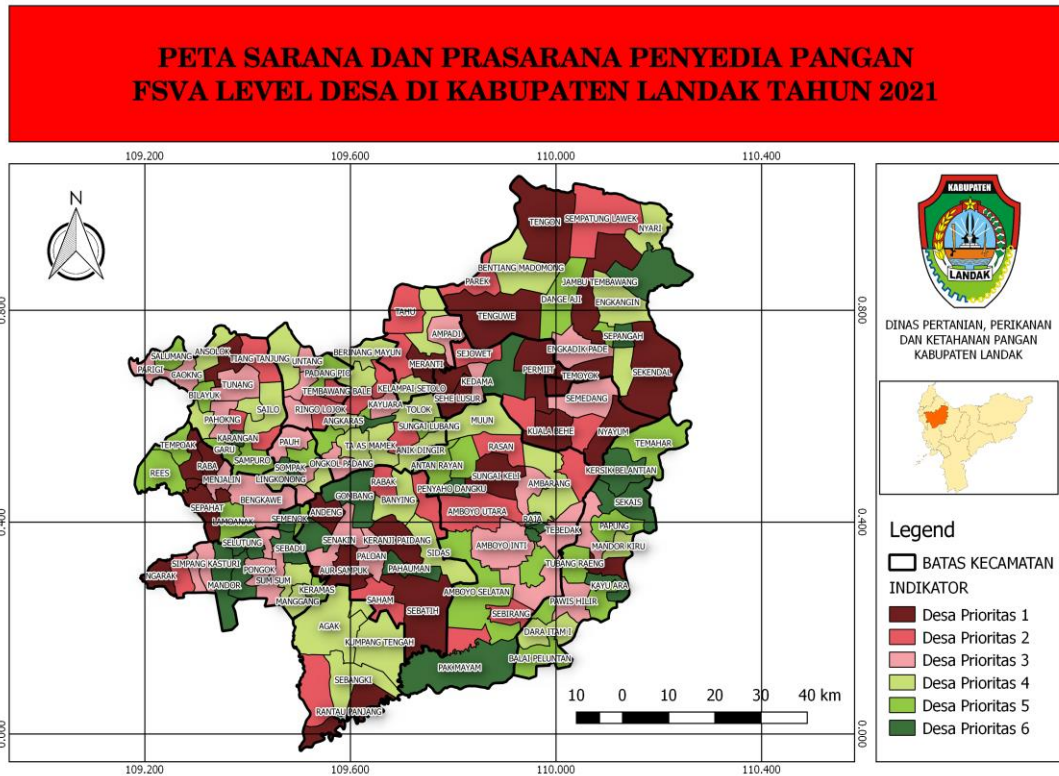
Sumber : DPPKP Kab. Landak, 2020

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi

rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 156 desa di Kabupaten Landak, 23 desa masuk dalam prioritas 1, 24 desa prioritas 2 dan 31 desa prioritas 3. Adapun desa-desa yang termasuk dalam beberapa prioritas tersebut dapat dilihat pada peta rasio sarana dan prasarana dibawah ini.



Keterangan rasio hasil peta tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini

Tabel 2.3 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio sarana ekonomi	Jumlah desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	23	14,74
2	Rentan	24	15,38
3	Agak Rentan	31	19,87
4	Agak Tahan	31	19,87
5	Tahan	24	15,38
6	Sangat Tahan	23	14,74

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
 - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
 - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES).
 - d. Pembangunan sumur pompa, dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat

- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- d. Pemasaran produk pertanian, misalnya toko tani indonesia (TTI)

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

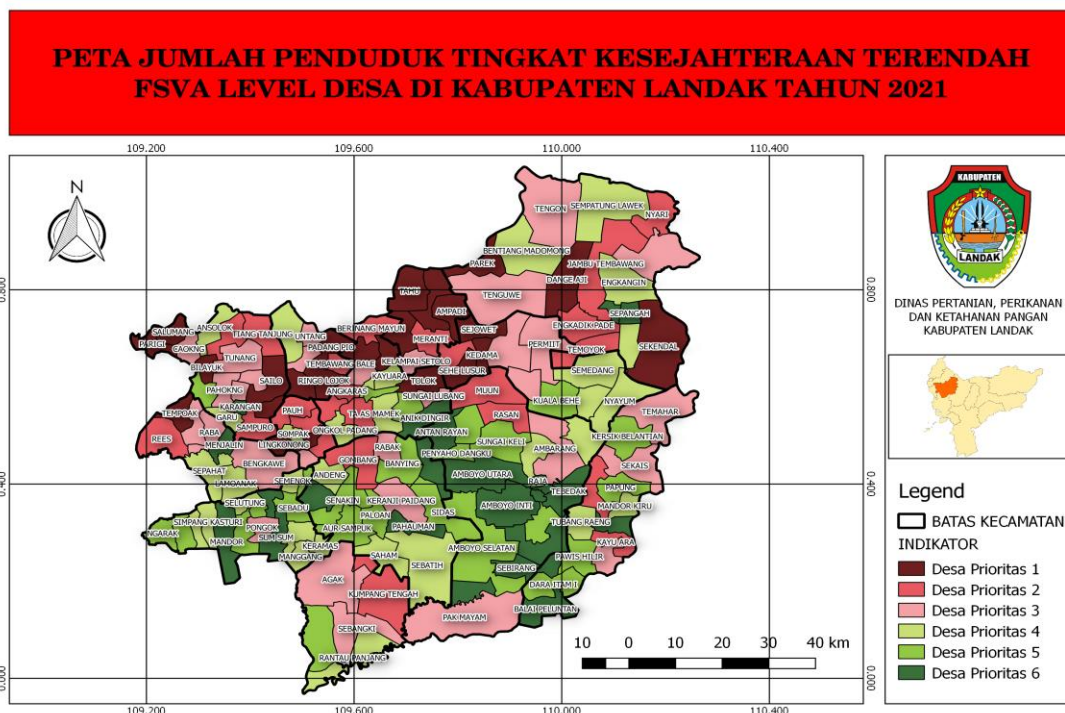
Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Landak Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Landak terus mengalami penurunan dari 13,51% (48.460 jiwa) tahun 2015 menjadi 12,32% (44.550 jiwa) tahun 2016, tahun 2017 12,23% tahun 2018, 11,77%, tahun 2019 kembali turun menjadi 11,47% dan tahun 2020 turun menjadi 11,12%.

Tabel 3.1 Persentase populasi dibawah garis kemiskinan Kabupaten Landak.

Keterangan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk miskin	13,51%	12,32 %	12,23%	11,77	11,47%	11,12%

Sumber: BPS, 2020

Pada tingkat desa berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin tahun 2018 yang digunakan sebagai acuan dalam data indikator rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terdapat 12 desa (7,69%) yang termasuk dalam prioritas 1, desa 12 desa (7,69%) masuk dalam prioritas 2, dan 17 desa (10,90%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 12 desa tersebut. Adapun jumlah desa yang termasuk dalam skala prioritas dapat dilihat pada peta rasio tingkat kesejahteraan penduduk dibawah ini.



Keterangan rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio penduduk tingkat kesejahteraan rendah	Jumlah desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	24	15,38
2	Rentan	24	15,38
3	Agak Rentan	30	19,23
4	Agak Tahan	32	20,51
5	Tahan	24	15,38
6	Sangat Tahan	22	14,10

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di

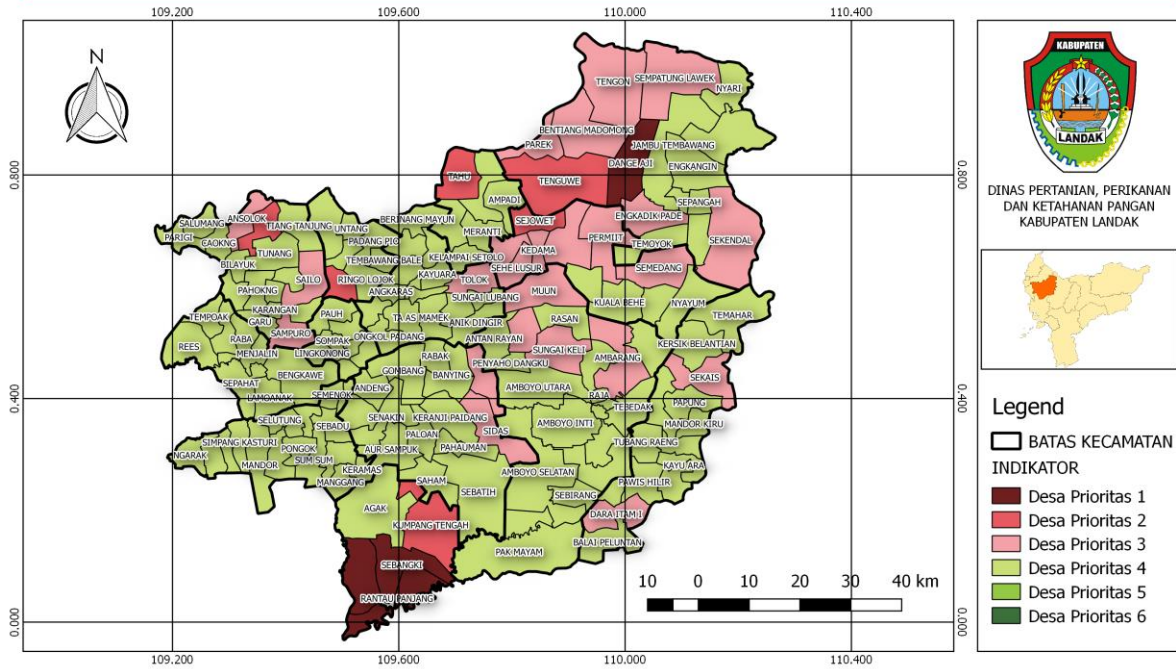
daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai.

Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Landak akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Sebangki, Kuala Behe dan Air Besar. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur. Adapun desa-desa yang termasuk dalam skala prioritas akses penghubung dalam dilihat pada peta dibawah ini.

**PETA DESA TANPA AKSES PENGHUBUNG MEMADAI
FSVA LEVEL DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021**



Tabel 3.3 Sebaran rasio akses jalan desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio desa tanpa akses penghubung	Jumlah desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	4	2,56
2	Rentan	6	3,85
3	Agak Rentan	24	15,38
4	Agak Tahan	122	78,21
5	Tahan	0	0
6	Sangat Tahan	0	0

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir.
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

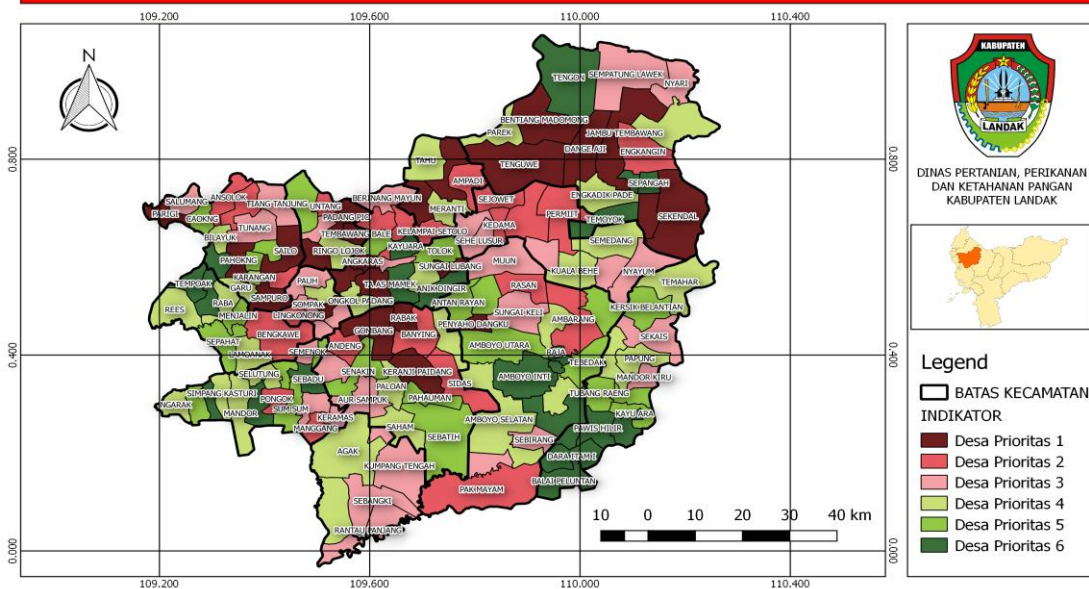
Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

**PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH
FSVA LEVEL DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021**



Tabel 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Rasio akses air bersih	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	24	15,38
2	Rentan	24	15,38
3	Agak Rentan	30	19,23
4	Agak Tahan	32	20,51
5	Tahan	24	15,38
6	Sangat Tahan	22	14,10

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio tenaga kesehatan	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Sangat Rentan	24	15,38
2	Rentan	24	15,38
3	Agak Rentan	30	19,23
4	Agak Tahan	32	20,51
5	Tahan	24	15,38
6	Sangat Tahan	22	14,10

4.3 DAMPAK (*OUTCOME*) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Landak pada tahun 2014-2018 sebanyak 3609 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Mempawah Hulu (137 balita) dan Kecamatan Mandor (124 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Menyuke (3 balita), Kuala Behe (3 balita) dan Kecamatan Meeranti (10 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2015-2019

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ngabang	-	5	57	38	172
2	Jelimpo	-	-	4	34	32

3	Kuala Behe	-	-	1	2	1
4	Air Besar	-	-	1	61	108
5	Sengah Temila	-	3	21	33	90
6	Mandor	-	2	63	61	60
7	Menjalin	-	5	36	49	74
8	Mempawah Hulu	-	-	56	81	67
9	Sompak	-	4	22	42	61
10	Meranti	-	1	9	-	30
11	Banyuke Hulu	-	3	54	68	73
12	Menyuke	-	3	-	-	4
13	Sebangki	-	-	10	34	24
	Total	-	26	334	503	796

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Landak adalah 57 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Landak 6 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Sengah Temila (13 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Meranti, Banyuke Hulu dan Jelimpo (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Mandor dan Menjalin (masing-masing 2 jiwa) dan terendah di Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe, Air Besar, Sengah Temila, Mempawah Hulu, Sompak, Meranti dan Banyuke Hulu (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Landak masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun

pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah.

Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi. Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

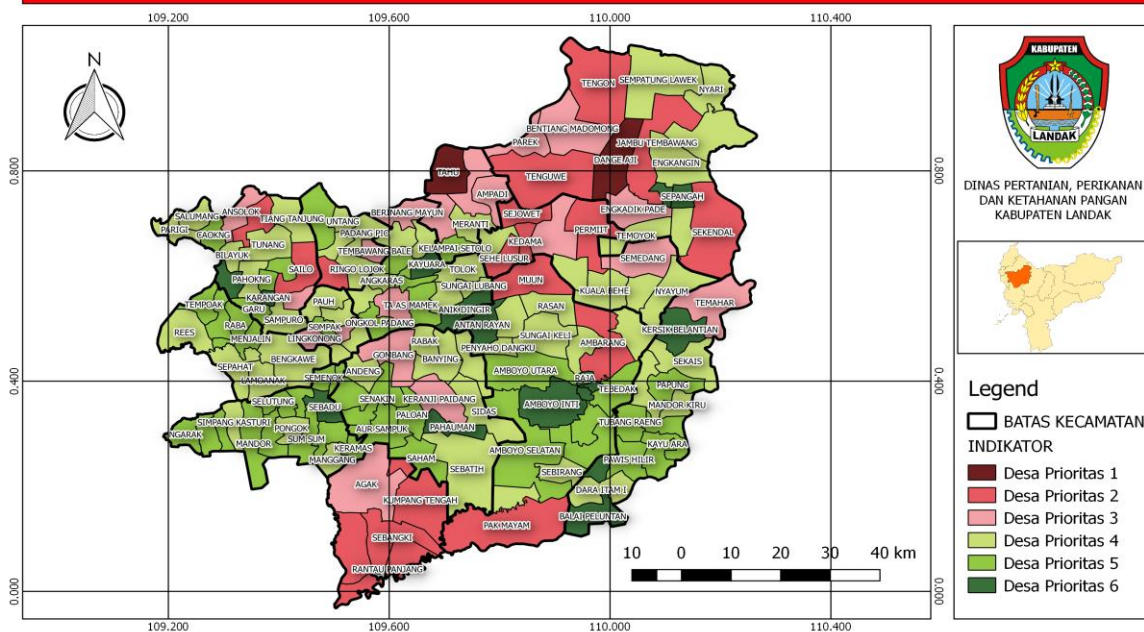
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan didalam Bab I, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada bab II, III dan IV. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (peta 6.1) ditetapkan melalui analisis pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Adapun hasil analisis komposit dapat dilihat pada peta komposit dibawah ini.

**PETA KOMPOSIT
FSVA LEVEL DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021**



Berdasarkan hasil analisis peta komposit tersebut, dari 156 desa yang ada di Kabupaten Landak maka didapatkan hasil ada 2 (dua) desa yang menjadi prioritas untuk di intervensi dengan program/kegiatan yaitu desa Tahu di kecamatan Meranti dan desa Dange Aji di kecamatan Air Besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1 Data sebaran prioritas peta komposit

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Meranti	Tahu	Prioritas 1
2	Air Besar	Dange Aji	
3	Air Besar	Tengon, Tenguwe, Jambu Tembawang, Sekendal	Prioritas 2
4.	Kuala Behe	Permit, Sejowet, Kedama, Sehe Lurus, Muun,	
5.	Ngabang	Ambarang, Pak Mayam	
6.	Sebangki	Rantau Panjang, Sebangki, Kumpang Tengah	
7.	Banyuke Hulu	Ringo Lojok	

8.	Mempawah Hulu	Sailo, Tiang Tanjung	
9.	Kuala Behe	Temahar	Prioritas 3
10.	Sebangki	Agak	
11.	Air Besar	Bentiang Madomang, Parek	
12.	Meranti	Ampadi	
13.	Mempawah Hulu	Ansolok, Karang	
14.	Menyuke	Taas, Berinang Mayun	
15.	Sengah Temila	Gombang, Keranji Paidang	

5.2 FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) kurangnya tenaga kesehatan (2) akses jalan, dan (3) penduduk miskin

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) akses jalan tidak memadai (2) penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, dan (3) kurangnya tenaga kesehatan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) akses air bersih (2) akses jalan, dan (3) kurangnya tenaga kesehatan.

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa prioritas 1 yaitu desa Tahu di Kecamatan Meranti dan desa Dange Aji di Kecamatan Air Besar.
- b. Desa prioritas 2 tersebar di kecamatan Sebangki yaitu Desa Rantau Panjang, desa Kumpang Tengah dan desa Sebangki. Di kecamatan Air Besar yaitu desa Tengon, desa Jambu Tembawang, desa Sekendal dan desa Tenguwe. Di kecamatan Kuala Behe yaitu desa Sejawet, desa Sehe Lurus, desa Kedama dan desa Permit. Di kecamatan Mempawah Hulu yaitu desa Ansolok dan desa Sailo. Di kecamatan Ngabang yaitu desa Ambarang.
- c. Desa prioritas 3 tersebar di kecamatan Sengah Temila yaitu desa Gombang, desa Keranji Paidang. Di kecamatan Sebangki yaitu desa Sebangki. Di kecamatan Jelimpo yaitu desa Temahar. Di kecamatan Air Besar yaitu desa Semedang, desa Bentiang Madomang, desa Parek, desa Engkadik Pade. Di kecamatan Menyuke yaitu desa Berinang Mayun dan desa Taas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

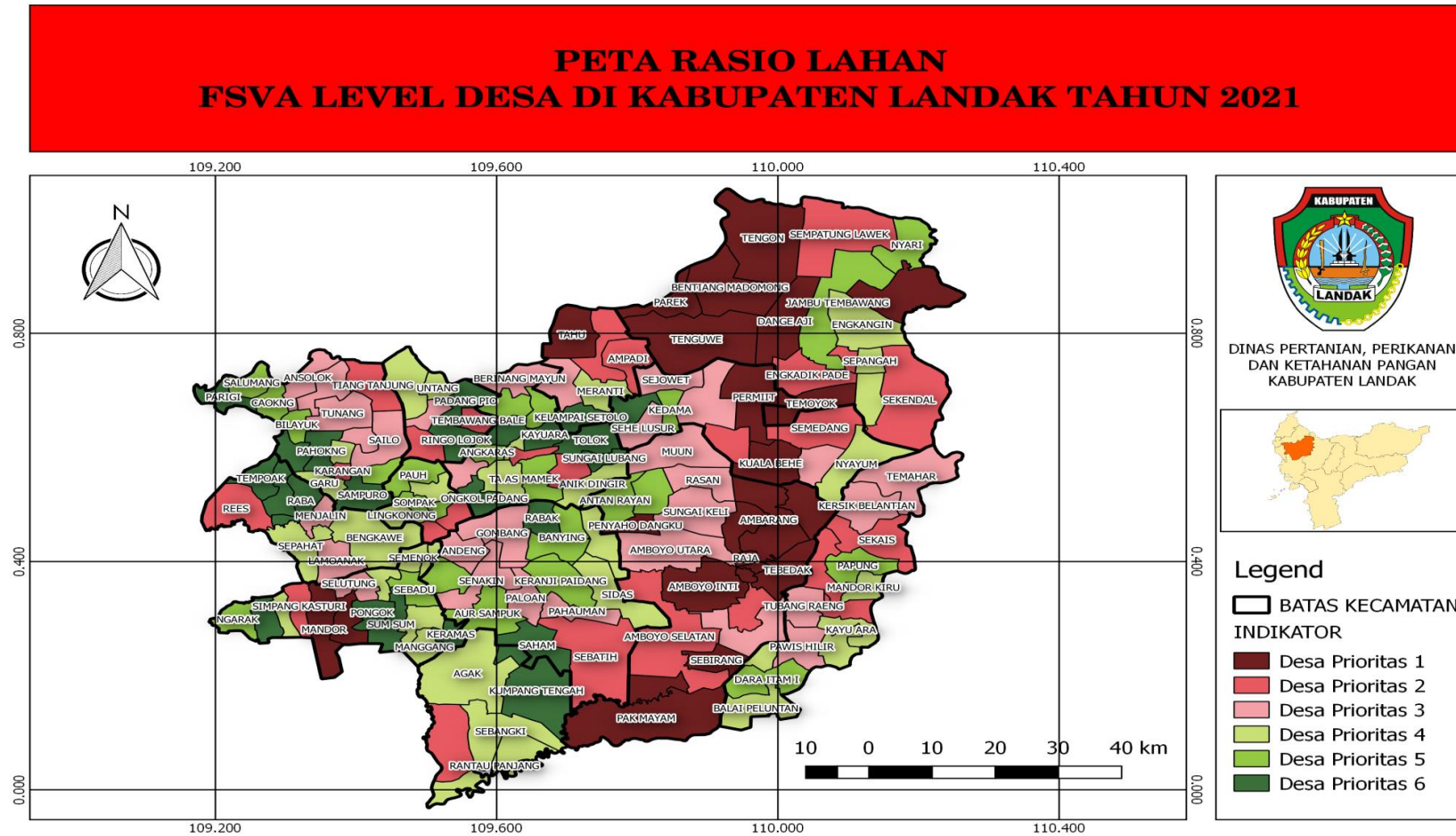


Gambar .4.1 Kerangka intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan

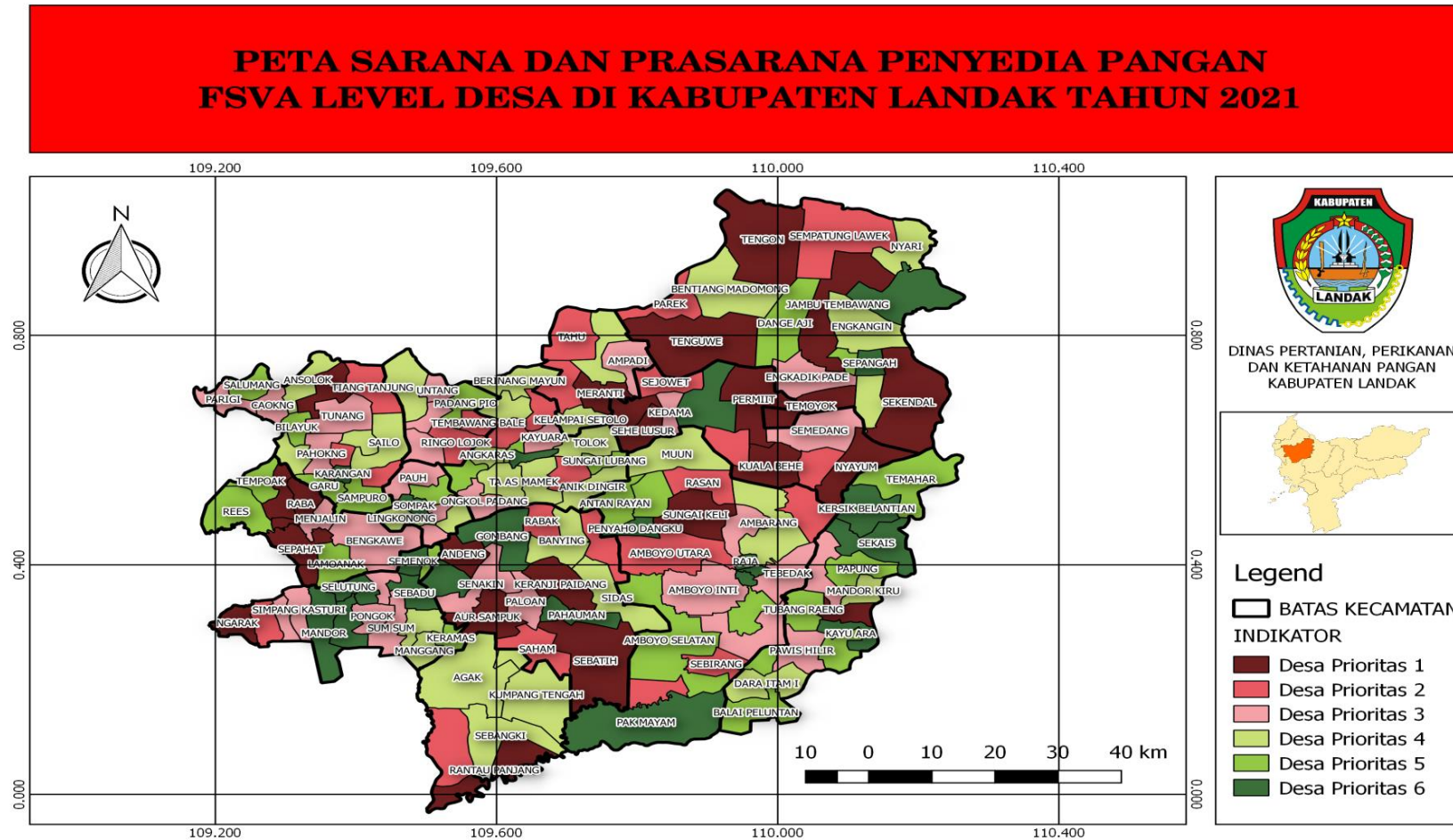
Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

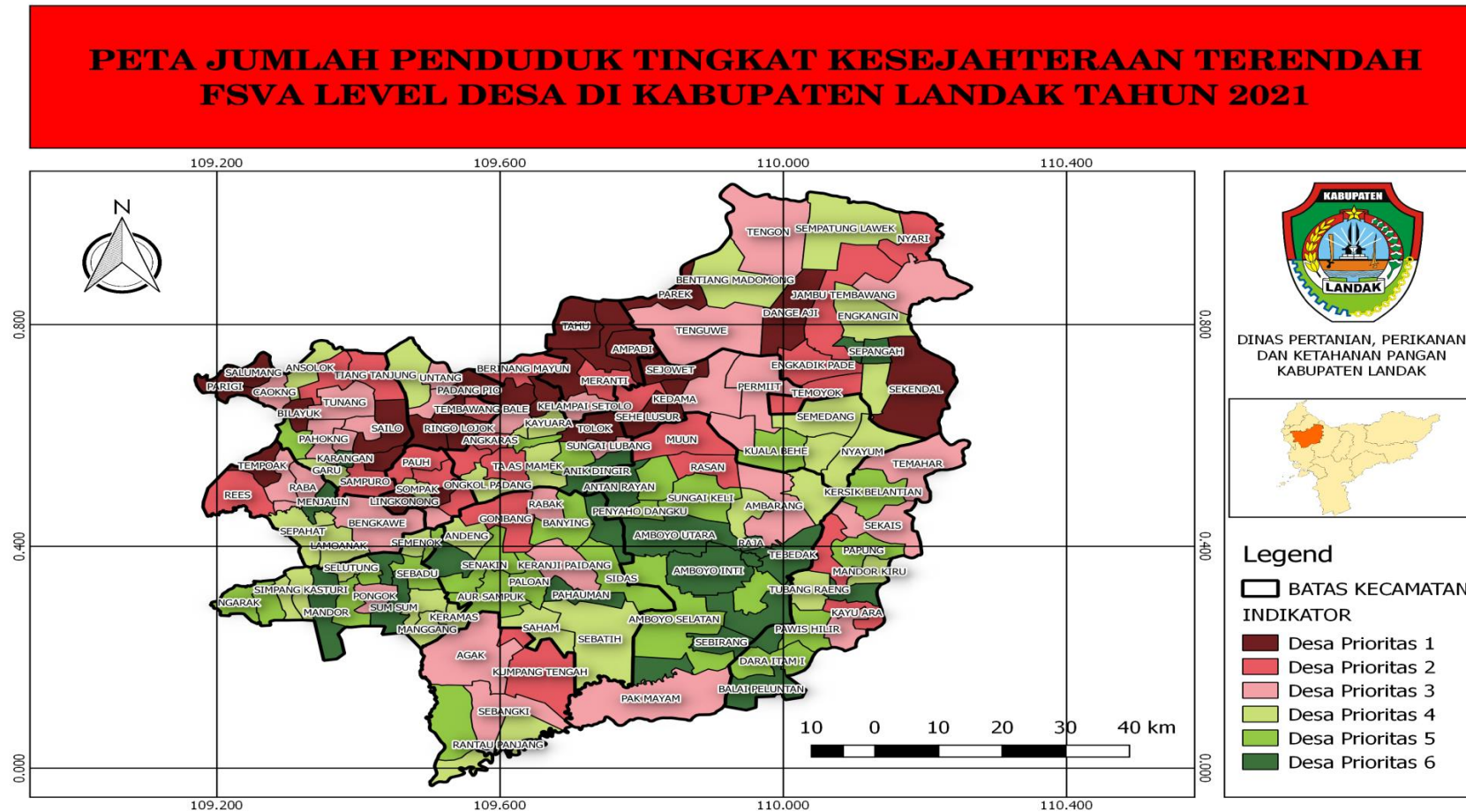
Lampiran 1. Peta lahan



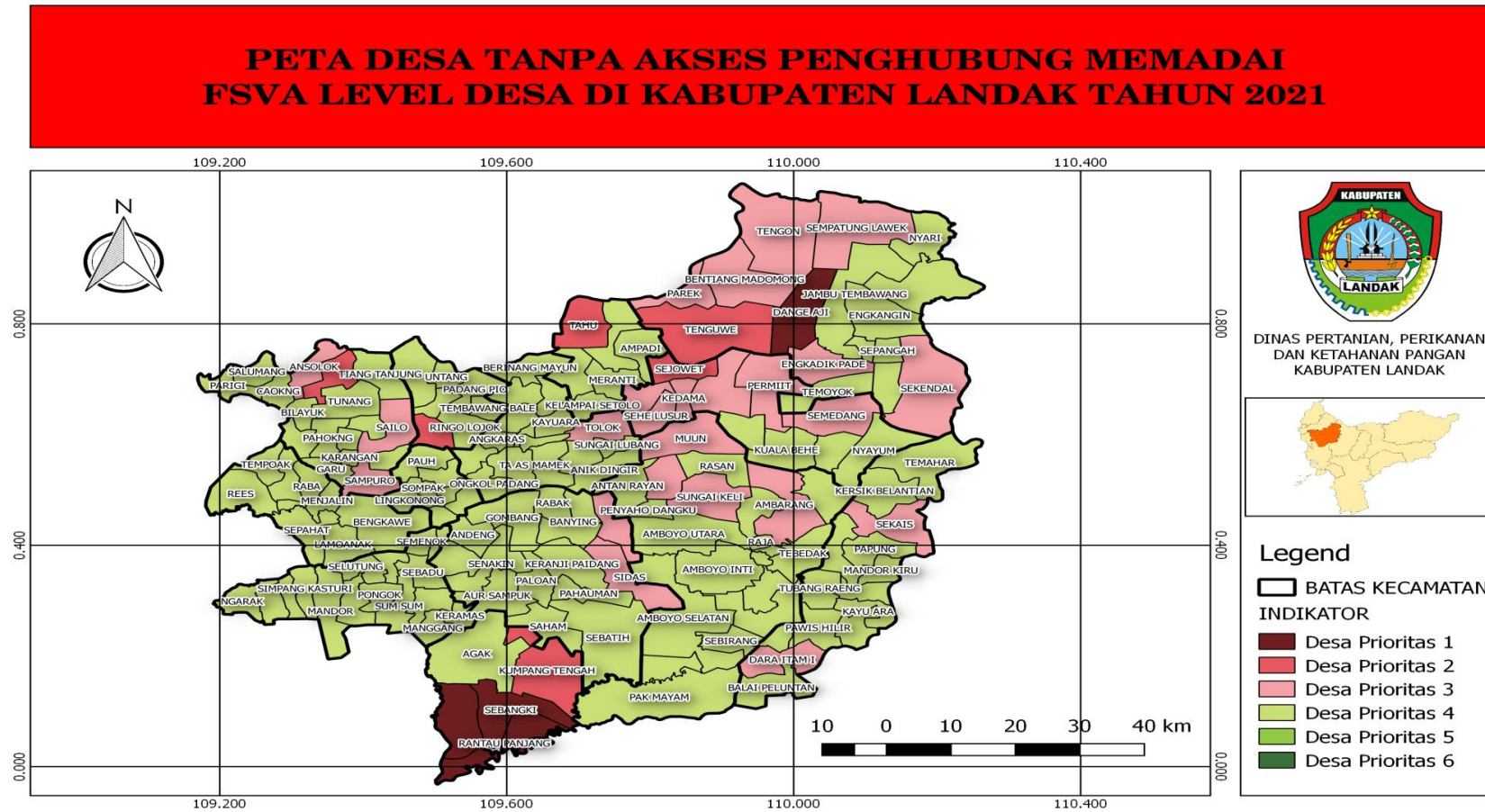
Lampiran 2. Peta sarana dan prasarana penyedia pangan



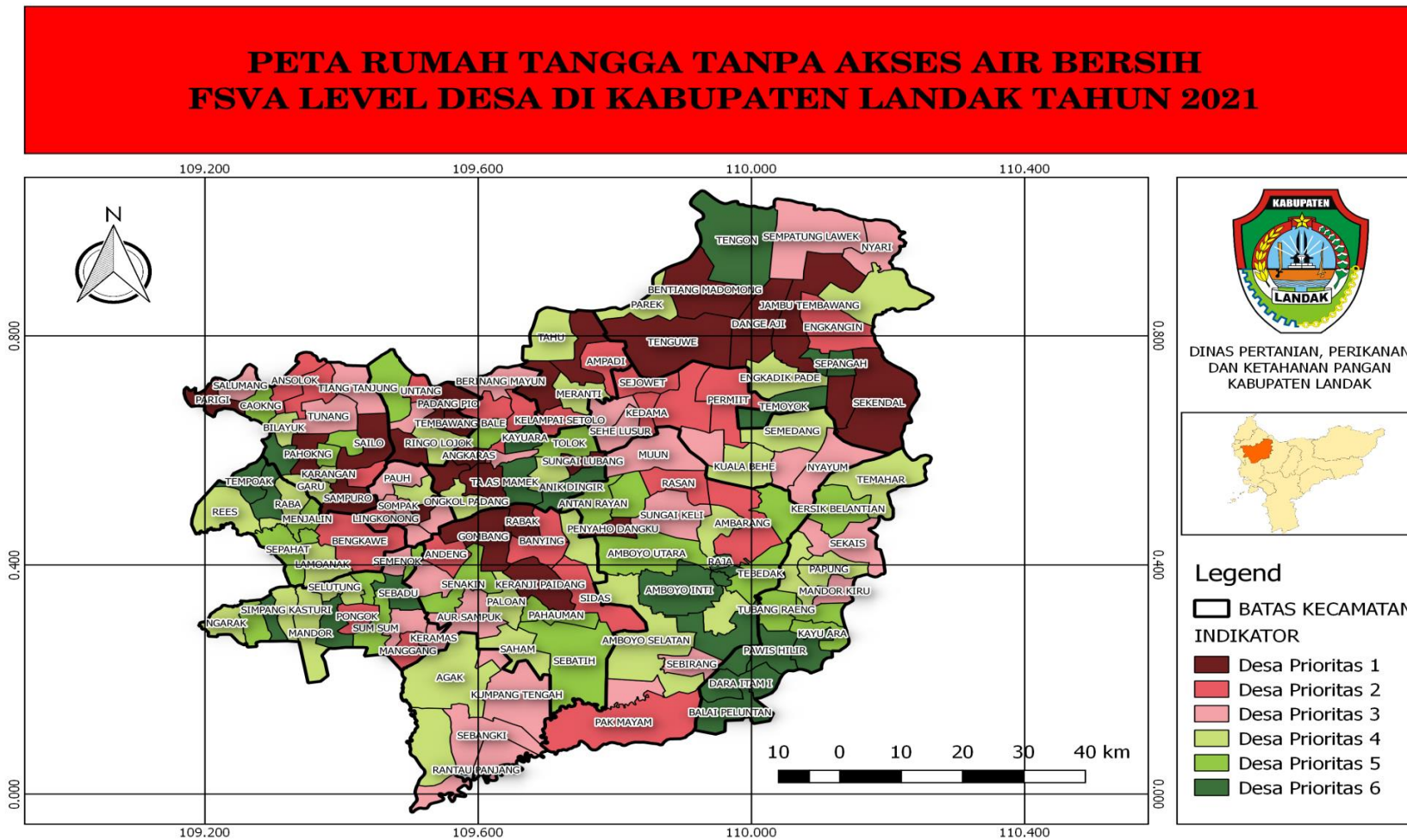
Lampiran 3. Peta jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah



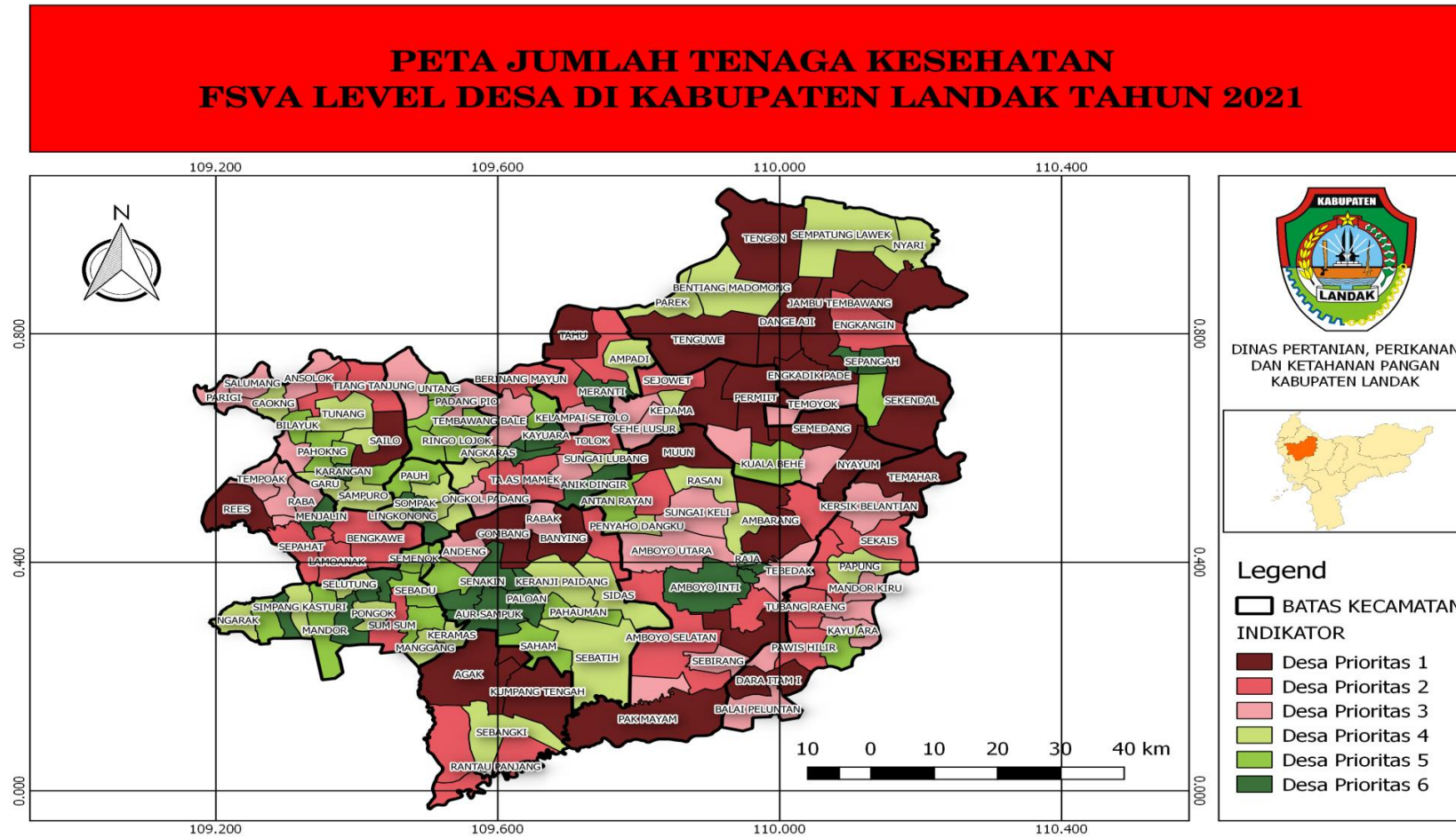
Lampiran 4. Peta desa tanpa akses penghubung memadai



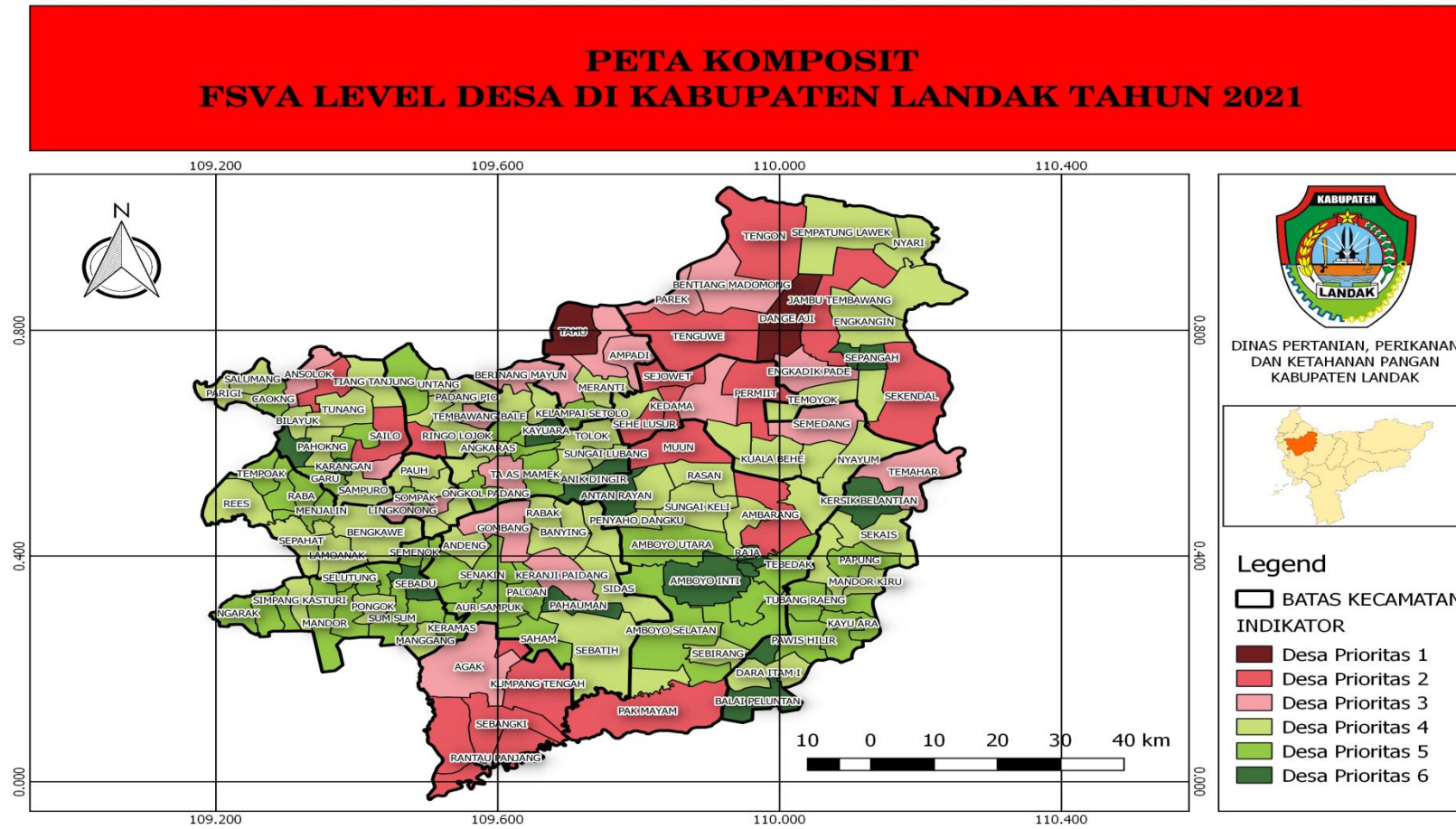
Lampiran 5. Peta rumah tangga tanpa akses air bersih



Lampiran 6. Peta jumlah tenaga kesehatan



Lampiran 7. Peta komposit



No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	SEBANGKI	6103020	6103020001	RANTAU PANJANG	4	1	4	1	3	2	38.53	147	2
2	SEBANGKI	6103020	6103020002	SEI SEGAK	2	2	5	1	4	2	40.79	139	2
3	SEBANGKI	6103020	6103020003	SEBANGKI	4	4	3	1	3	4	40.54	143	2
4	SEBANGKI	6103020	6103020004	KUMPANG TENGAH	4	4	2	2	3	1	37.88	148	2
5	SEBANGKI	6103020	6103020007	AGAK	4	4	3	4	4	1	48.42	127	3
6	NGABANG	6103030	6103030001	PAK MAYAM	1	0	3	4	2	1	39.40	145	2
7	NGABANG	6103030	6103030007	SEBIRANG	1	2	0	4	3	3	57.22	79	4
8	NGABANG	6103030	6103030008	AMBOYO SELATAN	2	5	5	4	4	2	61.61	55	5
9	NGABANG	6103030	6103030009	TEMIANG SAWI	3	3	1	4	1	1	62.30	48	5
10	NGABANG	6103030	6103030014	TEBEDAK	1	3	0	4	5	3	61.26	56	5
11	NGABANG	6103030	6103030015	HILIR TENGAH	1	0	0	4	0	0	75.98	2	0
12	NGABANG	6103030	6103030016	HILIR KANTOR	1	0	0	4	0	0	73.53	4	0
13	NGABANG	6103030	6103030017	AMBOYO INTI	1	3	0	4	0	0	68.35	15	0
14	NGABANG	6103030	6103030018	AMBOYO UTARA	3	2	0	4	5	3	63.02	42	5
15	NGABANG	6103030	6103030019	RAJA	1	0	0	4	0	0	75.42	3	0
16	NGABANG	6103030	6103030020	MUNGGU	1	3	4	4	4	4	58.50	70	4
17	NGABANG	6103030	6103030025	ENGGADU	1	2	4	4	5	2	55.26	94	4
18	NGABANG	6103030	6103030026	AMBARANG	1	4	3	3	2	1	40.57	142	2
19	NGABANG	6103030	6103030027	RASAN	3	2	2	4	2	4	50.94	117	4
20	NGABANG	6103030	6103030028	SENGAI KELI	3	1	5	3	3	3	51.54	115	4
21	NGABANG	6103030	6103030029	PENYAHO DANGKU	1	0	5	4	1	4	52.35	112	4
22	NGABANG	6103030	6103030030	ANTAN RAYAN	5	5	0	4	5	5	69.78	12	0
23	NGABANG	6103030	6103030031	AMANG	5	5	5	3	5	2	59.66	62	4
24	NGABANG	6103030	6103030032	MUUN	3	4	2	3	3	1	40.60	141	2
25	JELIMPO	6103031	6103031001	DARA ITAM I	5	4	5	3	0	1	59.59	63	4
26	JELIMPO	6103031	6103031002	BALAI PELUNTAN	4	5	0	4	0	3	68.41	14	0
27	JELIMPO	6103031	6103031003	ANGAN TEMBAWANG	4	5	3	4	0	5	67.59	20	5
28	JELIMPO	6103031	6103031004	KAYU ARA	4	0	2	4	5	3	60.57	59	5
29	JELIMPO	6103031	6103031005	PAWIS HILIR	3	3	5	4	0	2	64.99	32	5
30	JELIMPO	6103031	6103031006	TUBANG RAENG	3	5	4	4	5	2	64.67	34	5
31	JELIMPO	6103031	6103031007	JELIMPO	2	1	0	4	5	3	61.64	54	5
32	JELIMPO	6103031	6103031008	MANDOR KIRU	4	4	4	4	3	3	59.76	61	4
33	JELIMPO	6103031	6103031009	NYIIN	2	3	2	4	4	2	53.32	105	4
34	JELIMPO	6103031	6103031010	PAPUNG	5	5	5	4	4	4	66.19	28	5
35	JELIMPO	6103031	6103031011	SEKAIS	2	0	3	3	3	2	53.61	103	4
36	JELIMPO	6103031	6103031012	TEMAHAR	3	5	3	4	4	1	49.45	122	3
37	JELIMPO	6103031	6103031013	KERSIK BELANTIAN	3	0	5	4	5	3	72.09	8	0
38	SENGAH TEMILA	6103040	6103040001	TONANG	5	0	0	4	3	5	66.58	24	5
39	SENGAH TEMILA	6103040	6103040002	ANDENG	3	1	4	4	2	3	54.93	95	4
40	SENGAH TEMILA	6103040	6103040003	GOMBANG	3	0	2	4	0	1	47.10	130	3
41	SENGAH TEMILA	6103040	6103040004	PAHAUMAN	3	0	0	4	5	5	69.22	13	0
42	SENGAH TEMILA	6103040	6103040005	SIDAS	4	4	5	3	2	4	54.25	100	4
43	SENGAH TEMILA	6103040	6103040006	KERANJI MANCAL	4	2	0	3	4	2	56.75	84	4
44	SENGAH TEMILA	6103040	6103040007	BANYING	5	4	5	4	2	1	56.84	81	4
45	SENGAH TEMILA	6103040	6103040008	RABAK	0	2	3	4	0	3	55.66	92	4
46	SENGAH TEMILA	6103040	6103040009	SEBATHI	2	1	4	4	5	4	59.83	60	4
47	SENGAH TEMILA	6103040	6103040010	SAHAM	0	2	4	4	4	5	65.77	31	5
48	SENGAH TEMILA	6103040	6103040011	AUR SAMPUK	5	1	5	4	3	0	62.56	46	5
49	SENGAH TEMILA	6103040	6103040012	SENAKIN	3	3	5	4	5	0	66.03	30	5
50	SENGAH TEMILA	6103040	6103040013	PALUAN	3	3	5	4	4	0	63.18	41	5
51	SENGAH TEMILA	6103040	6103040014	KERANJI PAIDANG	5	1	3	4	0	4	49.53	121	3
52	MANDOR	6103050	6103050001	NGARAK	5	1	5	4	4	4	62.79	44	5
53	MANDOR	6103050	6103050002	KAYU TANAM	0	2	5	4	5	5	67.92	17	5
54	MANDOR	6103050	6103050003	SALA TIGA	4	3	4	4	0	0	67.50	21	5
55	MANDOR	6103050	6103050004	SIMPANG KASTURI	2	3	4	4	4	4	57.35	78	4
56	MANDOR	6103050	6103050005	MANDOR	1	0	0	4	4	5	62.61	45	5
57	MANDOR	6103050	6103050006	PONGOK	0	3	3	4	2	4	58.22	74	4

58	MANDOR	6103050	6103050007	KAYU ARA	1	0	5	4	0	0	66.59	22	5
59	MANDOR	6103050	6103050008	SELUTUNG	3	0	4	4	4	4	64.66	35	5
60	MANDOR	6103050	6103050009	KEROHOK	3	0	5	4	4	0	67.99	16	5
61	MANDOR	6103050	6103050010	BEBATUNG	4	3	5	4	5	5	67.74	18	5
62	MANDOR	6103050	6103050011	SUM SUM	0	3	0	4	5	2	66.24	27	5
63	MANDOR	6103050	6103050012	MANGGANG	4	4	4	4	2	4	56.84	82	4
64	MANDOR	6103050	6103050013	SEKILAP	4	4	4	4	3	5	62.97	43	5
65	MANDOR	6103050	6103050014	KERAMAS	0	5	4	4	3	4	63.41	39	5
66	MANDOR	6103050	6103050015	SEBADU	5	0	5	4	0	5	72.88	0	0
67	MANDOR	6103050	6103050016	SEMENOK	4	0	4	4	3	5	63.36	40	5
68	MANDOR	6103050	6103050017	MENGGUNYIT	4	5	5	4	5	5	66.59	23	5
69	MENJALIN	6103060	6103060001	LAMOANAK	3	5	4	4	4	2	58.92	68	4
70	MENJALIN	6103060	6103060002	BENGGAWA	4	3	3	4	2	2	53.25	106	4
71	MENJALIN	6103060	6103060003	MENJALIN	3	3	0	4	5	0	66.34	26	5
72	MENJALIN	6103060	6103060004	SEPAHAT	4	1	4	4	5	2	58.09	75	4
73	MENJALIN	6103060	6103060005	RABA	0	1	3	4	4	3	61.89	51	5
74	MENJALIN	6103060	6103060006	NANGKA	0	1	3	4	0	3	64.86	33	5
75	MENJALIN	6103060	6103060007	REES	2	5	2	4	4	1	52.75	109	4
76	MENJALIN	6103060	6103060008	TEMPOAK	0	5	1	4	0	3	63.51	38	5
77	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070007	SAMPURO	0	5	2	3	1	4	53.43	104	4
78	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070009	SEI LAKI	5	2	1	4	2	5	50.29	119	0
79	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070010	KARANGAN	2	0	0	4	4	0	77.03	1	0
80	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070011	GARU	4	5	4	4	4	4	64.32	36	5
81	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070012	BABATN	0	4	5	4	0	3	70.35	11	0
82	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070013	PAHOKNG	0	3	3	4	0	5	56.80	83	4
83	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070014	MENTONYEK	4	2	3	4	5	5	61.80	53	5
84	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070015	SAILO	3	4	1	3	1	1	39.61	144	2
85	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070016	S A L A S	3	4	3	4	5	4	62.24	49	5
86	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070017	TIANG TANJUNG	2	2	2	4	3	2	51.60	114	4
87	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070018	TUNANG	3	3	3	4	3	4	56.25	86	4
88	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070019	BILAYUK	5	5	1	4	4	5	59.02	67	4
89	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070020	SABAKA	3	1	2	2	2	2	37.79	149	2
90	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070021	ANSOLOK	3	4	4	3	2	3	47.87	128	3
91	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070022	CAOKNG	5	3	3	4	5	4	60.91	58	5
92	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070023	PARIGI	0	3	1	4	0	3	52.99	108	4
93	MEMPAWAH HULU	6103070	6103070024	SALUMANG	5	5	1	4	3	3	54.28	99	4
94	SOMPAK	6103071	6103071001	PAKUMBANG	2	3	3	4	3	0	57.63	77	4
95	SOMPAK	6103071	6103071002	TAPAKNG	2	4	2	4	3	4	53.21	107	4
96	SOMPAK	6103071	6103071003	AMAWAKNG	5	3	1	4	1	4	49.43	123	3
97	SOMPAK	6103071	6103071004	GALAR	4	5	2	4	4	4	59.33	65	4
98	SOMPAK	6103071	6103071005	SOMPAK	5	0	4	4	3	0	66.08	29	5
99	SOMPAK	6103071	6103071006	LINGKONONG	4	4	1	4	2	4	49.01	125	3
100	SOMPAK	6103071	6103071007	PAUH	5	3	2	4	3	5	55.38	93	4
101	MENYUKE	6103080	6103080001	LADANGAN	3	5	2	4	1	4	54.33	98	4
102	MENYUKE	6103080	6103080002	ONGKOL PADANG	0	3	4	4	4	3	66.56	25	5
103	MENYUKE	6103080	6103080003	TA AS	4	4	2	4	1	2	50.13	120	3
104	MENYUKE	6103080	6103080004	MAMEK	5	4	4	4	0	2	67.73	19	5
105	MENYUKE	6103080	6103080005	ANIK DINGIR	4	4	0	4	0	0	70.98	10	0
106	MENYUKE	6103080	6103080006	SEI LUBANG	0	5	3	4	1	4	58.65	69	4
107	MENYUKE	6103080	6103080007	TOLOK	0	4	1	3	5	2	59.55	64	4
108	MENYUKE	6103080	6103080008	BAGAK	2	2	5	4	4	3	59.06	66	4
109	MENYUKE	6103080	6103080009	DARIT	2	0	5	4	3	0	63.70	37	5
110	MENYUKE	6103080	6103080010	KAYUARA	0	3	4	4	0	0	72.60	7	0
111	MENYUKE	6103080	6103080011	ANSANG	4	5	4	4	2	0	62.00	50	5
112	MENYUKE	6103080	6103080012	ANGKARAS	5	4	2	4	0	4	53.77	102	4
113	MENYUKE	6103080	6103080017	SONGGA	0	2	3	4	5	3	62.40	47	5
114	MENYUKE	6103080	6103080018	LINTAH BETUNG	5	2	1	4	2	5	51.93	113	4
115	MENYUKE	6103080	6103080019	SIDAN	5	4	1	4	2	3	52.70	110	4
116	MENYUKE	6103080	6103080020	BERINANG MAYUN	3	4	2	4	3	2	50.54	118	3
117	BANYUKE HULU	6103081	6103081001	GAMANG	2	3	1	2	0	5	33.79	153	2

118	BANYUKE HULU	6103081	6103081002	RINGO LOJOK	5	2	1	4	4	5	55.91	90	4
119	BANYUKE HULU	6103081	6103081003	TEMBAWANG BALE	2	2	2	4	1	5	49.18	124	3
120	BANYUKE HULU	6103081	6103081004	PADANG PIO	5	5	1	4	1	3	52.36	111	4
121	BANYUKE HULU	6103081	6103081005	KAMPET	3	3	3	4	3	5	56.16	87	4
122	BANYUKE HULU	6103081	6103081006	SEMADE	4	4	4	4	5	3	61.88	52	5
123	BANYUKE HULU	6103081	6103081007	UNTANG	4	3	3	4	2	5	56.15	88	4
124	MERANTI	6103090	6103090001	KELAMPAI SETOLO	5	4	3	4	2	3	61.17	57	5
125	MERANTI	6103090	6103090002	MERANTI	4	1	2	4	4	5	56.12	89	4
126	MERANTI	6103090	6103090003	AMPADI	2	3	1	4	2	4	48.89	126	3
127	MERANTI	6103090	6103090004	SELANGE	2	4	1	4	1	2	43.06	136	3
128	MERANTI	6103090	6103090005	MORO BETUNG	3	2	1	4	1	2	45.14	134	3
129	MERANTI	6103090	6103090006	TAHU	1	2	1	2	4	1	28.92	155	1
130	KUALA BEHE	6103100	6103100001	SEHE LUSUR	3	1	1	3	3	3	39.16	146	2
131	KUALA BEHE	6103100	6103100002	KEDAMA	5	3	1	3	2	4	42.56	137	2
132	KUALA BEHE	6103100	6103100003	TANJUNG BALAI	2	2	3	4	3	3	54.64	96	4
133	KUALA BEHE	6103100	6103100004	KUALA BEHE	1	1	5	4	4	5	57.03	80	4
134	KUALA BEHE	6103100	6103100005	PAKU RAYA	3	2	4	4	3	3	56.61	85	4
135	KUALA BEHE	6103100	6103100006	NYAYUM	4	1	4	4	3	1	54.13	101	4
136	KUALA BEHE	6103100	6103100007	SEMEDANG	2	3	4	3	4	1	47.51	129	3
137	KUALA BEHE	6103100	6103100009	PERMIIT	1	1	3	3	2	1	35.30	150	2
138	KUALA BEHE	6103100	6103100010	ANGKANYAR	3	6	3	3	2	1	46.87	131	3
139	KUALA BEHE	6103100	6103100011	BENGAWAN AMPAR	5	1	2	3	3	3	58.23	73	4
140	KUALA BEHE	6103100	6103100012	SEJOWET	3	2	1	2	2	2	34.56	152	2
141	AIR BESAR	6103110	6103110001	PAREK	1	2	1	3	4	4	46.02	132	3
142	AIR BESAR	6103110	6103110002	TENGUWE	1	1	3	2	1	1	30.40	154	2
143	AIR BESAR	6103110	6103110003	ENGGADIK PADE	2	3	2	3	4	1	44.45	135	3
144	AIR BESAR	6103110	6103110004	SEMUNTIK	4	4	4	4	1	5	58.41	71	4
145	AIR BESAR	6103110	6103110005	SEKENDAL	2	1	1	3	1	1	34.58	151	2
146	AIR BESAR	6103110	6103110006	SEPANGAH	4	6	5	4	6	6	73.51	5	6
147	AIR BESAR	6103110	6103110007	SERIMBU	2	5	6	4	6	6	71.79	9	6
148	AIR BESAR	6103110	6103110008	JAMBU TEMBAWANG	5	1	2	4	1	1	42.18	138	2
149	AIR BESAR	6103110	6103110009	DANGE AJI	1	5	1	1	1	1	19.65	156	1
150	AIR BESAR	6103110	6103110010	BENTIANG MADOMANG	1	4	4	3	1	4	45.32	133	3
151	AIR BESAR	6103110	6103110011	TENGON	1	1	3	3	6	1	40.77	140	2
152	AIR BESAR	6103110	6103110012	SEMPATUNG LAWEK	2	2	4	3	3	4	51.00	116	4
153	AIR BESAR	6103110	6103110013	ENGGANGIN	4	4	4	4	2	2	54.42	97	4
154	AIR BESAR	6103110	6103110014	MERAYUH	1	6	3	4	4	1	58.01	76	4
155	AIR BESAR	6103110	6103110015	NYARI	5	4	2	4	3	4	55.69	91	4
156	AIR BESAR	6103110	6103110016	TEMOYOK	1	1	2	4	1	3	58.41	72	4